



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017

Wabup: Prestasi WTP

Berkat Kerja Keras Semua



PENYERAHAN. Antonius L. Ain Pamero menyerahkan dokumen pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah di Gedung DPRD, Kamis (2/8). **ANDREAS-RK**

PUTUSSIBAU-RK. Rapat paripurna dengan agenda pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 digelar gedung DPRD setempat, Kamis (2/8). Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero menyampaikan pidato pengantar.

Dijelaskan Wabup, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan yang sudah diperiksa BPK. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah, neraca laporan

arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah," terang.

Anton Pamero, sapaan akrab Wabup Kapuas Hulu ini menuturkan, hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kapuas Hulu 2017 mendapat predikat opini Wajar Tanpa



Pengacualian (WTP). Prestasi ini berkat kerja keras semua.

"Oleh karena itu, saya sampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kapuas Hulu beserta seluruh OPD, atas keberhasilan yang telah kita capai," ujarnya.

Laporan keuangan Pemkab Kapuas Hulu 2017 disusun berdasarkan konsolidasi. Yaitu menghimpun laporan keuangan OPD. Menghasilkan laporan tersebut terdiri dari realisasi anggaran, neraca, arus kas, operasional, perubahan ekuitas dan saldo anggaran lebih serta catatan atas laporan keuangan.

Tahun 2017 dilakukan dua tahap pemeriksaan. Yaitu pemeriksaan pendahuluan yang dimulai 13 Februari sampai 6 Maret 2018. Dilanjutkan pemeriksaan terinci sekitar 30 hari. "Yakni mulai tanggal 4 Mei sampai 1 Juni 2018," jelasnya.

Sebagai ringkasan hasil perhitungan laporan keuangan Pemkab tahun 2017 yang telah diaudit BPKRI, bahwa dalam struktur APBD terdiri dari 3 komponen pokok. Pendapatan, belanja dan pembiayaan. Total pendapatan Kapuas Hulu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.678 triliun lebih.

Realisasi sebesar Rp1.684 triliun lebih atau 100,36 persen. Unsur

pendapatan terdiri dari PAD, anggaran setelah perubahan sebesar Rp108 miliar lebih." Realisasi Rp131 miliar lebih," ucapnya.

Pendapatan transfer atau dana perimbangan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.569 triliun. Realisasi Rp1.553 triliun atau 98,94 persen. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah dari anggaran setelah perubahan Rp237 miliar lebih. "Realisasi Rp509 miliar lebih atau 214,41 persen," jelasnya.

Sedang total belanja dari anggaran setelah perubahan Rp1.413 triliun lebih. Realisasi Rp1.326 triliun lebih atau 93,89 persen. Unsur belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, kemudian dana transfer bagi hasil ke desa.

"Itu terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan ke desa, bantuan keuangan ke Pemda lainnya dan bantuan keuangan partai politik setelah perubahan yang mencapai Rp324 miliar lebih," paparnya.

Sedangkan pembiayaan Rp59.566 miliar lebih. Realisasi Rp45.690 miliar lebih atau 76,70 persen. Pembiayaan ini terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp87.859 miliar. "Realisasi Rp73.983 miliar lebih," ujarnya.

Kemudian pengeluaran pembiayaan dari anggaran setelah perubahan Rp28.293 miliar lebih. Ralisasi Rp28,293 miliar lebih atau 100 persen. Sedangkan Silpa tahun anggaran 2017 Rp78,621 miliar. Terdiri dari kas daerah, dana kapitasi JKN, saldo BLUD, dan deposito.

"Terdapat koreksi pencatatan pada saldo BLUD dan saldo dana BOS pusat yang mempengaruhi perhitungan Silpa tahun anggaran 2017 sebesar Rp874.323 miliar," ungkapnya.

Wabup menegaskan, laporan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tersebut menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas. Informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya. Sehingga pemerintah dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, membangun infrastruktur dan program-program prioritas daerah lainnya. "Agar daerah kita dapat maju dan berkembang sesuai harapan kita bersama," harap Wabup.

Laporan: Andreas
Editor: Arman Hairidi